

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN HORTIKULTURA DI UPT STA MANTUNG PUJON

Sri Setiyorini¹, Ali Hanafiah²

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Malang

Program Studi Administrasi Publik

Sri Setiyorini

Email: srisetiyorini954@gmail.com

Abstract

Marketing services for horticultural agricultural products are one of the important functions of the Mantung Agricultural Sub-Terminal (STA) Technical Implementation Unit (UPT) in supporting agricultural commodity marketing activities and helping farmers gain better market access. However, the implementation of this function has not been fully optimal. Therefore, an analysis of the implementation of the marketing service policy for horticultural agricultural products and the factors hindering its implementation is needed. This study aims to analyze and describe the implementation of the marketing service policy for horticultural agricultural products at the Mantung STA UPT, Pujon, as well as to analyze and describe the factors hindering its implementation. This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, with the analysis based on George C. Edward III's policy implementation model, which consists of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the marketing service policy for horticultural agricultural products at the Mantung STA UPT, Pujon, has been carried out but is not yet optimal. The communication aspect has supported service implementation through the delivery of service information and price information. The resource aspect indicates that the number and competence of employees are relatively supportive, but budgetary support remains limited. The disposition aspect indicates that employees demonstrate commitment in carrying out services, while the bureaucratic structure aspect shows that the UPT has several Standard Operating Procedures (SOPs), but there is no comprehensive SOP governing the entire marketing service process. The factors hindering implementation include limited budgets and infrastructure, limited development of human resource capacity in digital-based marketing, suboptimal coverage and integration of market information, and insufficient synergy and institutional support. Therefore, although the policy has been implemented at the basic service level, it still requires strengthening of resources, standardization of procedures, development of a market information system, and institutional support to improve the overall effectiveness of marketing services.

Keywords: Policy Implementation, Marketing Services, Horticulture.

Abstrak

Pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura merupakan salah satu fungsi penting UPT Sub Terminal Agribisnis (STA) Mantung Pujon dalam mendukung kegiatan pemasaran komoditas pertanian dan membantu petani memperoleh akses pemasaran. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan analisis terhadap implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura di UPT STA Mantung Pujon serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis berdasarkan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura di UPT STA Mantung Pujon telah berjalan, tetapi belum optimal. Aspek komunikasi telah mendukung pelaksanaan pelayanan melalui penyampaian informasi pelayanan dan informasi harga. Aspek sumber daya menunjukkan bahwa jumlah dan kompetensi pegawai relatif mendukung, tetapi dukungan anggaran masih terbatas. Aspek disposisi menunjukkan adanya komitmen pegawai dalam menjalankan pelayanan, sedangkan aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa UPT telah memiliki beberapa SOP, tetapi belum terdapat SOP yang secara komprehensif mengatur keseluruhan proses pelayanan pemasaran. Faktor yang menghambat implementasi meliputi keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, keterbatasan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pemasaran berbasis digital, belum optimalnya jangkauan dan integrasi informasi pasar, serta belum kuatnya sinergi dan dukungan kelembagaan. Dengan demikian, implementasi kebijakan telah terlaksana pada tingkat pelayanan dasar, tetapi masih memerlukan penguatan sumber daya, standardisasi prosedur, pengembangan sistem informasi pasar, dan dukungan kelembagaan agar fungsi pelayanan pemasaran dapat berjalan secara lebih optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelayanan Pemasaran, Hortikultura.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses tersebut, sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai penyedia pangan, penyerap tenaga kerja, serta pendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Setiawan, 2011). Salah satu subsektor pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah hortikultura, khususnya komoditas sayuran. Peningkatan permintaan terhadap sayuran sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan sehat (Anugrah, 2004). Kondisi tersebut menjadikan pengembangan sistem pemasaran hasil hortikultura sebagai bagian penting dalam mendukung keberlanjutan usaha pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem pemasaran yang efektif. Pemasaran hasil hortikultura masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti panjangnya rantai distribusi, fluktuasi harga, serta rendahnya posisi tawar petani (Irawan, 2007). Permasalahan pemasaran tersebut dapat menyebabkan rendahnya bagian harga yang diterima petani dan mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh dari kegiatan produksi pertanian. Widiyanti (2005) menjelaskan bahwa peningkatan kebutuhan terhadap

komoditas hortikultura perlu diikuti dengan sistem pemasaran yang mampu mendukung distribusi hasil pertanian secara lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan publik yang mampu menciptakan sistem pemasaran pertanian yang efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi petani.

Salah satu bentuk intervensi pemerintah dilakukan melalui pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagai sarana distribusi dan pemasaran hasil pertanian (Anugrah, 2004). Di Kabupaten Malang, kebijakan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sub Terminal Agribisnis Mantung Pujon. Berdasarkan Pasal 5, UPT STA Mantung Pujon memiliki tugas melaksanakan operasional pengelolaan STA, menjalin kemitraan, serta memfasilitasi pemasaran komoditas pertanian bagi petani. Selanjutnya, Pasal 6 mengatur fungsi UPT yang meliputi perencanaan, pelaksanaan operasional, pengelolaan administrasi, dan evaluasi kegiatan. Dengan adanya mandat tersebut, UPT STA Mantung Pujon memiliki posisi strategis sebagai instrumen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura.

Keberadaan regulasi tidak secara otomatis menjamin tercapainya tujuan kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh proses implementasinya di lapangan karena

implementasi merupakan tahap yang menentukan apakah tujuan kebijakan dapat direalisasikan secara nyata (Winarno, 2012:112). Hal tersebut menjadi semakin penting karena Kecamatan Pujon merupakan salah satu sentra hortikultura di Kabupaten Malang dengan berbagai komoditas unggulan, seperti kubis, wortel, kentang, tomat, dan sawi (Baladina, 2012). Dengan potensi tersebut, UPT STA Mantung Pujon seharusnya mampu menjalankan fungsi pelayanan pemasaran secara optimal. Namun, masih terdapat indikasi bahwa pelaksanaan fungsi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Permasalahan tersebut telah ditunjukkan oleh penelitian Baladina dkk. (2012) yang menemukan bahwa beberapa layanan di UPT STA Mantung belum berjalan secara optimal. Mekanisme transaksi masih menyerupai pasar konvensional, sedangkan orientasi pengelolaan yang lebih menitikberatkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan fungsi pemberdayaan petani belum terlaksana secara maksimal. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan kondisi implementasi di lapangan. Di sisi lain, penelitian mengenai STA Mantung juga menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki peran dalam menyediakan informasi harga dan mendukung aktivitas pemasaran sayuran, sehingga keberadaan STA tetap

memiliki nilai strategis bagi pelaku pertanian di wilayah Pujon. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian yang tidak hanya melihat keberadaan STA, tetapi secara khusus menganalisis bagaimana kebijakan pelayanan pemasaran tersebut diimplementasikan serta faktor yang menghambat pelaksanaannya.

Dalam perspektif kebijakan publik, evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan (Dunn, 2003:608). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura di UPT STA Mantung Pujon serta menganalisis dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan Publik Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2016:126), “implementasi kebijakan adalah berbagai aktivitas yang dilakukan baik oleh individu, pejabat, serta lembaga pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menegaskan bahwa implementasi bukan sekadar pelaksanaan teknis, melainkan juga melibatkan sikap, komitmen, dan koordinasi berbagai aktor yang berkepentingan”.

Teori Implementasi Kebijakan Publik

George C. Edward III (1980:10) dalam bukunya *Implementing Public Policy* (1980) menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, adapun dari keempat variabel tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi menempati posisi pertama yang berperan krusial dalam pelaksanaan regulasi. Edward III (1980:17) mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan dari suatu kebijakan yang efektif mensyaratkan seseorang yang menjalankan suatu kebijakan harus mengetahui dengan jelas apa yang harus mereka lakukan. Perintah-perintah implementasi harus diteruskan secara akurat kepada para pelaksana agar kebijakan dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksudkan oleh pembuat keputusan.

2. Sumber Daya (Resources)

Unsur kedua yang memegang peran krusial dalam kesuksesan implementasi adalah ketersediaan sumber daya. Edward III (1980:53) menyatakan bahwa meskipun perintah-perintah implementasi telah dikomunikasikan secara akurat dan konsisten, jika para pelaksana minim sumber daya yang diperlukan, maka aktualisasi tak akan beroperasi dengan baik.

3. Disposisi (Disposition)

Disposisi merupakan faktor ketiga yang memengaruhi implementasi kebijakan.

Edward III (1980:89) menjelaskan bahwa disposisi adalah sikap dari para pelaksana kebijakan. Apabila para pelaksana bersikap positif terhadap suatu kebijakan, maka berkemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana dikehendaki oleh pembuat keputusan.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi juga menjadi salah satu factor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980:125) menyatakan bahwa meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana memahami tugasnya, implementasi masih bisa terhambat apabila struktur birokrasi tidak mendukung. Ada dua karakteristik utama strujtur atau tatanan birokrasi yang relevan, yaitu standar prosedur operasional (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan fragmentasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura di UPT Sub Terminal Agribisnis (STA) Mantung Pujon, Kabupaten Malang . penelitian ini dilakukan pada 29 Juli 2026 sampai 18 Agustus 2026. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Informan dipilih secara

purposive berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kebijakan yang diteliti, yaitu Kepala UPT STA Mantung, Bendahara UPT STA Mantung, petani hortikultura, dan pedagang yang bertransaksi di STA Mantung.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap proses pelayanan serta aktivitas pemasaran di UPT STA Mantung. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2017, struktur organisasi, laporan kegiatan, data transaksi, serta dokumen lain yang relevan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, teknik pengumpulan data, dan waktu pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura di UPT STA Mantung dilakukan melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung dengan petani serta pedagang. WhatsApp digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan dan perkembangan harga komoditas, sedangkan pertemuan langsung digunakan untuk

memberikan penjelasan dan klarifikasi. Temuan ini diperkuat melalui observasi dan dokumentasi grup WhatsApp “Info Harga STA Mantung”. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi telah mendukung pelaksanaan kebijakan melalui penyampaian informasi yang cepat dan adanya komunikasi dua arah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rusnadiyah, Sumadinata, dan Sari (2021) yang menunjukkan pentingnya komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu. Patriani dan Wuysang (2022) juga menunjukkan bahwa keterbatasan komunikasi dapat menghambat implementasi kebijakan, sedangkan Jami (2016) menemukan bahwa penyampaian informasi yang belum optimal menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi. Berbeda dengan temuan tersebut, UPT STA Mantung telah menggunakan komunikasi digital dan langsung sehingga petani dan pedagang dapat memperoleh informasi serta melakukan klarifikasi.

Meskipun demikian, komunikasi di UPT STA Mantung belum sepenuhnya optimal. Pemanfaatan WhatsApp masih berfokus pada penyampaian informasi harga dan belum berkembang menjadi sistem informasi pasar yang lebih luas. Dengan demikian, komunikasi telah menjadi faktor pendukung implementasi, tetapi masih perlu dikembangkan untuk memperluas informasi pasar, memperkuat koordinasi pemasaran,

dan membantu petani maupun pedagang dalam mengambil keputusan pemasaran.

Sumber Daya

Sumber daya dalam implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura di UPT STA Mantung Pujon dilihat dari kecukupan pegawai, kompetensi pegawai, dan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecukupan pegawai telah mendukung pelaksanaan pelayanan. UPT STA Mantung memiliki 10 pegawai dengan pembagian tugas sesuai jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Keterangan dari pengelola, pegawai, petani, dan pedagang menunjukkan kesesuaian bahwa jumlah pegawai yang tersedia masih mampu menjalankan kegiatan pelayanan dan pemasaran. Temuan ini sejalan dengan Ismail (2018) yang menunjukkan bahwa sumber daya dapat menjadi faktor pendukung implementasi ketika tersedia dan mampu menunjang pelaksanaan tugas. Namun, Parsan (2015) menekankan bahwa keberhasilan implementasi juga membutuhkan penguatan sumber daya secara berkelanjutan, tidak hanya dari aspek jumlah tetapi juga kualitasnya.

Dari aspek kompetensi pegawai, hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai UPT STA Mantung memiliki kemampuan yang mendukung pelayanan pemasaran, khususnya dalam mengumpulkan, mengolah, memperbarui, dan menyampaikan informasi harga komoditas kepada petani dan pedagang.

Kemampuan tersebut juga didukung oleh kegiatan pelatihan atau peningkatan kapasitas pegawai. Informasi harga yang diperbarui secara rutin dinilai bermanfaat bagi pengguna layanan dalam mengetahui perkembangan pasar. Temuan ini sejalan dengan Haris(2017) yang menunjukkan pentingnya sumber daya manusia dalam mendukung implementasi kebijakan pengembangan kompetensi aparatur. Herlambang, Idris, dan Noor (2017) juga menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kapasitas pegawai dalam melaksanakan tugas organisasi. Dengan demikian, kompetensi pegawai di UPT STA Mantung menjadi salah satu sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, anggaran menjadi aspek yang masih menghambat optimalisasi implementasi kebijakan. Secara normatif, Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 14 menetapkan bahwa pembiayaan UPT STA Mantung dibebankan pada APBD Kabupaten Malang dan sumber lain yang sah. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat anggaran khusus dari pemerintah daerah untuk kegiatan pemasaran. UPT lebih banyak mengandalkan penerimaan dari aktivitas STA untuk mendukung operasional, sementara penerimaan tersebut juga memiliki kewajiban untuk disetorkan sebagai PAD. Kondisi ini menyebabkan UPT harus menyesuaikan kebutuhan operasional dan pengembangan

pelayanan dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Temuan tersebut sejalan dengan Patriani dan Wuysang (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya dapat menghambat optimalisasi implementasi kebijakan. Parsan (2015) juga menegaskan pentingnya dukungan sumber daya dalam keberhasilan implementasi, sedangkan Nadhifa, Lestari, dan Rostyaningsih (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat membatasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pegawai UPT STA Mantung Pujon menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura. Sikap dan komitmen pegawai terlihat dari keberlangsungan kegiatan operasional STA sebagai tempat distribusi dan transaksi komoditas hortikultura, pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab, serta kerja sama antpegawai dalam memberikan pelayanan. Komitmen tersebut juga ditunjukkan melalui penyediaan dan pembaruan informasi harga yang disampaikan kepada petani dan pedagang, termasuk melalui grup WhatsApp “Info Harga STA Mantung”. Hasil observasi memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan adanya aktivitas pelayanan dan interaksi langsung antara pegawai dengan pengguna layanan.

Temuan ini menunjukkan bahwa pegawai tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki kemauan untuk mempertahankan fungsi pelayanan pemasaran sesuai kebutuhan pengguna layanan. Sikap tersebut penting karena pelayanan pemasaran hortikultura membutuhkan respons terhadap perubahan harga dan kondisi pasar yang berlangsung secara dinamis. Dengan adanya komitmen pegawai dalam menyediakan informasi dan mempertahankan aktivitas pelayanan, kebijakan dapat diterjemahkan ke dalam kegiatan nyata di lapangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Yulianti, Beki, Irawati, dan Sintaningrum (2019) yang menunjukkan bahwa disposisi pelaksana berperan penting dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Setyawan dan Srihardjono (2016) juga menemukan bahwa komitmen dan tanggung jawab aparatur menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan Undang-Undang Desa. Sementara itu, Suryani, Anggraini, dan Mandasari (2025) menunjukkan bahwa sikap dan kepatuhan pelaksana turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan disiplin pegawai. Temuan-temuan tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa sikap positif, komitmen, dan tanggung jawab pegawai menjadi unsur penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi UPT STA Mantung Pujon telah mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan, tetapi belum optimal dalam keseluruhan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura. Pelayanan yang dilakukan meliputi penyediaan tempat perdagangan, fasilitas sortasi, pembersihan dan pengemasan, serta balai lelang. Namun, kegiatan tersebut belum didukung oleh satu SOP yang mengatur keseluruhan tahapan pelayanan pemasaran secara terintegrasi, mulai dari penerimaan produk, penyampaian informasi harga, transaksi, hingga proses pemasaran.

Meskipun demikian, UPT STA Mantung telah memiliki beberapa SOP untuk kegiatan tertentu, terutama SOP sistem informasi harga. SOP tersebut mengatur proses survei harga, pengolahan dan pelaporan data, penyampaian informasi melalui WhatsApp, serta pengarsipan. Selain itu, terdapat SOP terkait retribusi pancoan, keamanan, dan ketertiban. Keberadaan SOP tersebut menunjukkan bahwa sebagian kegiatan telah memiliki prosedur kerja yang jelas, tetapi belum mencakup seluruh rangkaian pelayanan pemasaran. Kondisi ini menyebabkan struktur birokrasi belum sepenuhnya mampu memberikan standar kerja yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pemasaran.

Temuan ini sejalan dengan Haris (2017) yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi

merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena menentukan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Nurhikmah dan Zaini (2025) juga menemukan bahwa kejelasan pembagian tugas dan prosedur kerja dapat mendukung implementasi kebijakan secara lebih terarah. Sementara itu, Habsana, Kencono, dan Fridayani (2026) menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura di UPT STA Mantung Pujon telah berjalan, tetapi belum optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, keterbatasan kompetensi SDM dalam pengembangan pemasaran digital, belum optimalnya jangkauan informasi pasar, serta belum kuatnya sinergi dan dukungan kelembagaan. Hambatan tersebut lebih banyak berkaitan dengan keterbatasan pengembangan fungsi pelayanan dibandingkan dengan ketidakmampuan UPT dalam menjalankan pelayanan yang telah tersedia.

Pertama, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana menjadi hambatan dalam pengembangan pelayanan pemasaran. UPT STA Mantung masih menghadapi

keterbatasan dukungan keuangan untuk pemeliharaan, revitalisasi, dan pengembangan fasilitas, termasuk fasilitas pascapanen seperti penyimpanan dan pengemasan. Kondisi tersebut menyebabkan fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung sistem pemasaran yang terintegrasi. Temuan ini sejalan dengan Baladina (2012) yang menemukan bahwa beberapa layanan di STA Mantung belum berjalan optimal dan mekanisme transaksi masih menyerupai pasar konvensional. Anugrah (2004) juga menekankan pentingnya pengembangan fasilitas dan mekanisme STA untuk memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian. Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak menghentikan pelayanan, tetapi membatasi kemampuan UPT dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan.

Kedua, keterbatasan kompetensi SDM dalam pengembangan pemasaran berbasis digital menjadi hambatan berikutnya. Pegawai telah mampu menggunakan WhatsApp untuk menyampaikan informasi harga, tetapi pemanfaatan teknologi belum berkembang menjadi sistem informasi pasar terpadu, e-commerce, atau sistem pemasaran digital yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan SDM bukan terletak pada kemampuan menjalankan pelayanan yang telah tersedia, melainkan pada kebutuhan kompetensi yang lebih spesifik untuk melakukan inovasi pelayanan. Temuan

tersebut sejalan dengan Sari dan Rahayu (2021) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dapat menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital pegawai diperlukan untuk mendukung pengembangan pelayanan pemasaran.

Ketiga, belum optimalnya jangkauan dan integrasi informasi pasar juga menjadi hambatan. Informasi harga telah disampaikan secara berkala melalui WhatsApp, tetapi masih terbatas pada informasi harga dan belum mencakup informasi pasar yang lebih luas, seperti permintaan, jaringan pembeli, dan peluang pemasaran. Kondisi tersebut membatasi kemampuan UPT dalam menjalankan fungsi sebagai penghubung antara petani dan pasar. Hal ini relevan dengan Irawan (2007) yang menunjukkan pentingnya informasi dalam menciptakan sistem pemasaran hortikultura yang lebih efisien dan meningkatkan posisi tawar petani.

Keempat, belum kuatnya sinergi dan keberlanjutan dukungan kelembagaan turut menjadi hambatan. Pengembangan fungsi STA tidak hanya bergantung pada kemampuan internal UPT, tetapi juga membutuhkan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah, petani, pedagang, dan pelaku usaha. Kondisi tersebut penting karena Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2017 memberikan mandat kepada UPT STA Mantung untuk menjalin kemitraan dan

memfasilitasi pemasaran komoditas pertanian bagi petani. Temuan ini sejalan dengan Sari dan Rahayu (2021) yang menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga yang belum optimal dapat menghambat implementasi kebijakan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura di UPT STA Mantung Pujon telah berjalan, tetapi belum optimal. Komunikasi telah dilakukan melalui penyampaian informasi harga dan pelayanan kepada pengguna layanan. Ketersediaan dan kompetensi pegawai relatif mendukung, sementara komitmen pegawai menjadi faktor pendukung pelaksanaan pelayanan. Namun, dukungan anggaran masih terbatas dan struktur birokrasi belum sepenuhnya optimal karena belum tersedia SOP yang mengatur keseluruhan proses pelayanan pemasaran secara terintegrasi.

Hambatan utama dalam implementasi meliputi keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, keterbatasan kompetensi dalam pengembangan pemasaran berbasis digital, belum optimalnya jangkauan dan integrasi informasi pasar, serta belum kuatnya sinergi dan dukungan kelembagaan. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan pemasaran tetap dapat berjalan, tetapi fungsi UPT STA Mantung sebagai pusat pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura belum dapat

dikembangkan secara optimal dan terintegrasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, UPT STA Mantung Pujon perlu menyusun SOP yang mengatur seluruh tahapan pelayanan pemasaran hasil pertanian hortikultura agar pelaksanaan pelayanan lebih jelas dan terarah. Pemerintah Kabupaten Malang dan instansi terkait juga perlu meningkatkan dukungan anggaran serta sarana dan prasarana, terutama fasilitas yang mendukung penanganan hasil pertanian setelah panen. Selain itu, UPT STA Mantung perlu meningkatkan kemampuan pegawai dalam penggunaan teknologi digital dan pengelolaan informasi pasar agar informasi yang diberikan tidak hanya berupa harga, tetapi juga dapat membantu petani dan pedagang memperoleh informasi pasar yang lebih luas. Koordinasi antara UPT, petani, pedagang, kelompok tani, pelaku usaha, dan instansi terkait juga perlu ditingkatkan untuk memperluas jaringan pemasaran. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih lanjut mengenai digitalisasi pemasaran, sistem informasi pasar, kerja sama pemasaran, dan dukungan anggaran dalam meningkatkan akses pasar bagi petani.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Anugrah, I. S. (2004). *Pengembangan Sub Terminal Agribisnis (STA) dan pasar*

- lelang komoditas pertanian dan permasalahannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 22(2), 102-112.
- Ashari, S. (2006). *Hortikultura Aspek Budidaya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI Press).
- Baladina, N. (2012). Analisis struktur, perilaku, dan penampilan pasar wortel di Sub Terminal Agrobisnis (STA) Mantung (Kasus pada sentra produksi wortel di
- Baladina, N., Anindita, R., & Setiawan, B. (2012). Struktur pasar dan peran STA Mantung dalam pemasaran komoditas hortikultura. *AGRISE: Jurnal Agribisnis*, 12(2), 101-112.
- Desa Tawangsari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). *Agricultural Socio-Economics Journal (AGRISE)*, 12(2), 91-102.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik (edisi kedua)*. Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Habsana, T. Y. P., Kencono, D. S., & Fridayani, H. D. (2026). Implementation Challenges of Indonesia's Electronic-Based Government System: An Edwards III Perspective. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 7(2), 168-180.
- Harbani. 2008. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Haris, R. A. (2017). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Sumenep. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 102-111.
- Herlambang, R., Idris, A., & Noor, M. (2017). Implementasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Bontang Barat Kota Bontang. *Jurnal Administrative Reform*, 2(1), 38-47.
- Hidayat, A., & Nugroho, S. (2021). Peran lembaga pemasaran pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 9(1), 45-56.
- Irawan, B. (2007). Fluktuasi harga, transmisi harga dan margin pemasaran sayuran dan buah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(4), 358-373.
- Ismail, I. (2018). Implementasi seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (jpt) pratama bagi pns dalam rangka reformasi birokrasi di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia kabupaten sumedang provinsi jawa barat. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 6(1), 1-30.
- Jami, F. (2016). Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. *PubliA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(4).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Nadhifa, A. A., Lestari, H., & Rostyaningsih, D. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pelatihan Teknis PNS di Bkpsdm Kabupaten Tegal. *Journal of Management and Public Policy*, 11(3), 101-118.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Nurhikmah, N., & Zaini, M. (2025). Analisis Implementasi Standar Operasional Prosedur Pada Kinerja Koperasi Studi Kasus Koperasi Sumber Kasih Sejahtera. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(7), 3157-3164.
- Panjaitan, V. E. (2020). Implementasi kebijakan new normal aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan LIPI Bandung. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 4(2), 269-291.
- Parsan, R. (2015). Analisis Implementasi Kebijakan Program NTB-BSS Di Lombok Tengah. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(01).
- Patriani, I., & Wuysang, J. M. (2022). Analisis Faktor Komunikasi dan Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Standar Pelayananadministrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kantor Camat Sekadau Hilir, Sekadau. *Journal of Syntax Literate*, 7(6), 8141.
- Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Sub Terminal Agribisnis Mantung Pujon
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan pangan: Situasi, permasalahan, kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 1-27.
- Rahmawati, D. (2020). Efektivitas pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 88-97.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Robbins, S. P. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Rusnadiyah, R., Sumadinata, W. S., & Sari, D. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Tahun 2020. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 105-123.
- Sari, R. P., & Rahayu, A. Y. S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *PERSPEKTIF*, 10(1), 230-238.
- Setiawan, A. B. (2011). Peran sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Geografi Gea*, 11(1).
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi*, 6(2).
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligensia Media.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, L. P. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudiyono, A. (2004). *Pemasaran Pertanian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM Press).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, A. (2014). Menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan 2025: Tantangan dan penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32(2), 123-135.

Suryani, R. A., Anggraini, D., & Mandasari, L. (2025). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang). *Jurnal Stia Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 11(2), 133-144.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Wahab, Solichin Jiari. 2012. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widiyanti, E. (2005). Perilaku konsumen dalam membeli produk sayuran di pasar modern. *CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, 1(2), 24-35.

Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: Teori, proses dan studi kasus. CAPS.

Yulianti, R., Bakti, H., Irawati, I., & Sintaningrum, S. (2019). Efek Disposisi Pejabat Pengelola Informasi Publik Di Dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1).